

Alih Media Arsip: Implementasi Dan Hambatan Dalam Meningkatkan Manajemen Kearsipan Di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat

Zulfiani Amelia Putri*, Rahmadhona Fitri Helmi

Universitas Negeri Padang

Abstrak: Alih media arsip mengacu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi alih media arsip dalam meningkatkan manajemen kearsipan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Metode yang digunakan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teori implementasi Van Meter & Van Horn yang mencakup 6 variabel, yaitu (tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik lembaga pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi antar lembaga, dan lingkungan sosial, ekonomi, politik) serta teori hambatan dari Hendrawati (2014) yang terdiri atas 4 indikator, yaitu anggaran, kesiapan SDM (sumber daya manusia), ketersediaan infrastruktur dan kebijakan perlunya adanya SOP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alih media arsip telah dilakukan sejak 2012, namun masih menghadapi hambatan, seperti kurangnya SDM yang berkompeten, keterbatasan sarana pendukung, dan rendahnya pemanfaatan arsip digital. Meski begitu, alih media telah membantu pelestarian arsip dan akses informasi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas SDM, perbaikan infrastruktur digital, dan optimalisasi implementasi kebijakan agar manajemen kearsipan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Alih Media Arsip, Manajemen Kearsipan, Digitalisasi, Implementasi Kebijakan, Dinas Kearsipan.

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v6i2.301>

*Correspondence: Zulfiani Amelia Putri

Email: ameliazulfiani86@gmail.com

Received: 29-06-2025

Accepted: 29-07-2025

Published: 29-08-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to analyze the implementation of archive media transfer in improving archive management at the Archives and Library Service of West Sumatra Province. The method used in this study is descriptive qualitative with the implementation theory of Van Meter & Van Horn which includes 6 variables, namely (policy objectives, resources, characteristics of implementing agencies, implementer attitudes, inter-agency communication, and social, economic, and political environments) and the theory of obstacles from Hendrawati (2014) which consists of 4 indicators, namely budget, HR readiness (human resources), infrastructure availability and policies on the need for SOPs. The results of the study indicate that archive media transfer has been carried out since 2012, but still faces obstacles, such as a lack of competent HR, limited supporting facilities, and low utilization of digital archives. Even so, media transfer has helped archive preservation and information access. This study recommends increasing HR capacity, improving digital infrastructure, and optimizing policy implementation so that archive management becomes more effective and sustainable.

Keywords: Archive Media Transfer, Archives Management, Digitization, Policy Implementation, Archives Service.

Pendahuluan

Seiring dengan peningkatan kebutuhan akan layanan yang lebih cepat dan akuntabel, pemerintah Indonesia telah menetapkan untuk mengubah pengelolaan arsip menjadi digital. Dengan demikian, pengelolaan arsip digital menjadi semakin penting dalam dunia serba digital seperti saat sekarang ini, dan dokumen dan informasi yang tersimpan dalam format digital semakin menjadi bagian yang paling penting dari sistem kearsipan dan lembaga informasi. Selain itu, arsip digital berguna sebagai tempat penyimpanan cadangan untuk dokumen yang hilang (Rumengan et al, 2021). Pengalihan media arsip dari bentuk fisik ke bentuk digital untuk membuatnya lebih mudah dikelola dan diakses adalah langkah penting dalam transformasi ini. Upaya ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang mengatur sistem penyelenggaraan kearsipan nasional, termasuk pengelolaan arsip, dan alih media untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya (Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, 2009). Sebagai peraturan pelaksana dari UU tersebut, diterbitkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Alih Media Arsip Statis dengan Metode Konversi, peraturan ini secara khusus mengatur tata cara pengelolaan arsip digital, termasuk prosedur alih media arsip ke dalam format digital, serta memberikan pedoman teknis dalam pelaksanaan alih media arsip guna memastikan legalitas, keaslian, dan keamanannya (Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Alih Media Arsip Statis dengan Metode Konversi, 2021). Berdasarkan data dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), kondisi digitalisasi arsip di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam rentang waktu tahun 2023 hingga 2024. Adapun indeks tingkat digitalisasi arsip di Indonesia dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip Di Indonesia

Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip Di Indonesia				
No	Klaster	2023	2024	Kenaikan
1	Kementerian/Lembaga	81,76	85,14	3,38
2	Provinsi	74,02	78,53	4,51
3	Kabupaten/Kota	42,57	59,83	17,26
4	Capaian Nasional	66,12	74,50	8,38

Sumber: Refleksi Akhir Tahun Arsip Nasional Republik Indonesia 2024 Menuju 2025-Arsip Nasional Republik Indonesia

Berdasarkan tabel 1. capaian indeks digitalisasi arsip secara nasional meningkat dari 66,12 pada tahun 2023 menjadi 74,50 pada tahun 2024, atau mengalami kenaikan sebesar 8,38. Namun, jika dibandingkan dengan target nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yaitu sebesar 85,00 pada tahun 2024, maka capaian indeks digitalisasi sebesar 74,50 tersebut masih menunjukkan adanya

kesenjangan sebesar 10,5 poin. Artinya, meskipun peningkatan sudah cukup signifikan dalam dua tahun terakhir, tetapi upaya digitalisasi arsip secara nasional masih memerlukan akselerasi, terutama di tingkat pemerintah kabupaten/kota yang saat ini masih menjadi klaster dengan capaian terendah.

Di Provinsi Sumatera Barat, kegiatan alih media arsip menjadi bagian penting dari upaya pelestarian dan peningkatan aksesibilitas informasi publik yang secara aktif dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat yang dimulai dari tahun 2012. Berdasarkan data alih media arsip yang diperoleh dari Dinas tersebut, menunjukkan bahwa terdapat komitmen dari berbagai lembaga terhadap upaya digitalisasi arsip sebagai bagian dari pengelolaan arsip modern berbasis teknologi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah arsip yang berhasil dialihmediakan pada tahun 2023 dan 2024, yang menunjukkan partisipasi aktif instansi-instansi terkait dalam upaya pelestarian dokumen penting secara digital. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut:

Tabel 2. Jumlah dan Sumber Arsip Alih Media di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023–2024

No	Tahun	Jumlah Arsip (Lembar)	Sumber Arsip
1	2023	25.627 Lembar	AA Navis, Aminuzal Amin, Arsip Belanda, Arsip Pekerjaan Umum (PU), Eks Deppen, Mayjen Djuanda, Biro Humas, Rohana Kudus, Arsip Sumbar–Bengkulu
2	2024	12.259 Lembar	Kanwil Deppen, Eks IKIP, PT Bank Nasional, BKD, Bela Negara, TVRI, M. Syafei, RRI Padang

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat

Proses alih media ini dilakukan dengan menggunakan perangkat pemindai (*scanner*) serta sistem identifikasi *barcode*, yang tidak hanya mempercepat proses digitalisasi, tetapi juga meningkatkan akurasi dan kemudahan dalam pelacakan serta penyimpanan data arsip. Namun, dalam pelaksanaan alih media arsip, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, khususnya para arsiparis menghadapi beberapa kendala diantaranya yaitu: 1) Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang alih media arsip. 2) Sarana dan prasarana yang kurang mendukung, seperti kondisi peralatan yang kurang berfungsi dengan baik sehingga berdampak pada menurunnya kualitas arsip hasil alih media. 3) Masih rendahnya penggunaan dan pemanfaatan arsip digital sebagai tulang punggung manajemen dan bahan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana komitmen Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat dalam mengimplementasikan kebijakan alih media arsip, serta mengidentifikasi berbagai faktor penghambat yang dihadapi selama proses pelaksanaan berlangsung dalam upaya meningkatkan manajemen kearsipan.

Metodologi

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Pasaribu et al, 2022), Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dari subjek penelitian serta perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, yang beralamat di Jl. Pramuka 5 No.2 Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Sumatera Barat dengan pertimbangan munculnya sejumlah permasalahan yang dipaparkan pada pendahuluan. Pengumpulan data dilaksanakan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan alih media arsip. Data yang telah terkumpul selanjutnya diseleksi menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber (Hardani et al., 2020). Hasil analisis disusun dalam bentuk narasi dan ditarik kesimpulan guna menghasilkan informasi dan pengetahuan (Sahir, 2021).

Hasil dan Pembahasan

A. Implementasi Alih Media Arsip Dalam Meningkatkan Manajemen Kearsipan Di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat (Teori Van Meter dan Van Horn)

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Hartawan et al., 2023), implementasi kebijakan merupakan proses penerapan pemahaman atas suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai tingkat keberhasilan pelaksanaan yang maksimal. Proses ini dipengaruhi oleh keterkaitan sejumlah faktor yang saling berhubungan. Dalam penelitian ini, implementasi kebijakan dikaji melalui enam aspek utama yang dijelaskan dalam teori Van Meter dan Van Horn.

1. Tujuan Kebijakan

Berdasarkan hasil temuan, diketahui bahwa kebijakan digitalisasi arsip yang diterapkan oleh instansi kearsipan di tingkat provinsi Sumatera Barat telah memiliki tujuan serta arah yang jelas, yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan nasional, yakni Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 mengenai Alih Media Arsip Statis dengan Metode Konversi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak lahir tanpa dasar, melainkan didorong oleh kebutuhan sistemik dalam rangka menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi informasi serta tuntutan efisiensi dalam pengelolaan arsip.

Tujuan dari kebijakan ini mencakup beberapa aspek utama, yaitu: pertama, sebagai upaya penyelamatan dan pelestarian arsip agar tidak rusak atau hilang; kedua, untuk memudahkan akses terhadap informasi arsip oleh publik; dan ketiga, sebagai bagian dari strategi digitalisasi dokumen dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tujuan-tujuan tersebut bukan hanya bersifat normatif, namun juga operasional karena secara nyata dijadikan rujukan oleh pelaksana kebijakan dalam menjalankan proses

alih media arsip.

Dengan adanya keselarasan antara tujuan kebijakan dan implementasinya di lapangan, maka dapat dikatakan bahwa faktor kejelasan tujuan dalam model Van Meter dan Van Horn telah terpenuhi. Kejelasan tujuan ini juga turut memperkuat pemahaman para pegawai terhadap arah kebijakan yang dijalankan, sehingga mampu mendorong efisiensi kerja, mempercepat proses digitalisasi, serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan arsip. Dengan demikian, aspek tujuan kebijakan dalam pelaksanaan alih media arsip di instansi ini dapat dinilai telah dirumuskan secara tepat dan mendukung upaya perbaikan manajemen kearsipan di era digital.

2. Sumber Daya

Implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan efektivitas pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh instansi pelaksana. Menurut teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn, sumber daya menjadi salah satu variabel yang secara langsung menentukan efektivitas implementasi, baik dalam bentuk manusia, anggaran, teknologi, maupun informasi. Berdasarkan temuan yang diperoleh penulis, aspek sumber daya manusia menjadi perhatian utama. Jumlah tenaga pelaksana khusus alih media arsip yang tersedia hanya sebanyak tujuh orang dan masih tergolong belum ideal jika dibandingkan dengan volume pekerjaan yang ada, namun pelaksanaan kegiatan tetap berjalan secara optimal. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi dalam pemanfaatan SDM yang tersedia, di mana meskipun secara kuantitatif terbatas, namun secara kualitatif dinilai cukup mampu untuk mengakomodasi kebutuhan implementasi. Kemampuan para pelaksana dalam menjalankan tugasnya secara efektif menunjukkan bahwa kompetensi dan komitmen mereka cukup tinggi, sehingga keterbatasan jumlah dapat diatasi dengan kinerja yang produktif.

Keberhasilan pelaksanaan alih media arsip turut ditunjang oleh kesiapan fasilitas yang dimiliki. Instansi pengelola arsip di Provinsi Sumatera Barat telah menyediakan sejumlah perlengkapan seperti pemindai khusus arsip, komputer, kamera digital, serta *hard disk*. Bahkan, dukungan perangkat penyimpanan digital seperti hard disk eksternal juga telah tersedia, yang sangat vital dalam menjaga keamanan dan keberlanjutan hasil digitalisasi arsip.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat keterbatasan pada sisi kuantitas sumber daya manusia, namun dukungan sarana-prasarana yang memadai serta pemanfaatan sumber daya yang ada secara efisien telah menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan alih media arsip. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh jumlah sumber daya yang dimiliki, melainkan juga oleh bagaimana sumber daya tersebut dikelola dan dioptimalkan.

3. Karakteristik Lembaga Pelaksana

Karakteristik lembaga pelaksana merupakan salah satu indikator kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik sebagaimana dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Salah satu aspek utama dari karakteristik ini adalah struktur organisasi yang mengatur bagaimana lembaga menjalankan peran dan fungsinya dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata.

Struktur organisasi yang selaras dengan kebutuhan program turut menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan alih media arsip di lembaga kearsipan provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa kewenangan pelaksanaan kegiatan alih media arsip berada di bawah Bidang Kearsipan, yang kemudian dijalankan secara teknis oleh dua seksi utama, yaitu Seksi Pengelolaan Arsip dan Seksi Pemeliharaan dan Pelestarian Arsip. Struktur ini memungkinkan terjadinya spesialisasi kerja dan mempermudah pelaksanaan tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administratif.

Lebih lanjut, dalam pelaksanaan operasional di lapangan, pembentukan tim kerja yang terdiri dari beberapa unit fungsional seperti tim persiapan fisik arsip, tim pemindaian, tim verifikasi dan metadata, serta tim pengelolaan sistem penyimpanan digital menunjukkan bahwa organisasi ini telah menerapkan pendekatan kerja yang sistematis. Hal ini mencerminkan adanya pembagian tugas yang tidak hanya berdasarkan struktur formal, namun juga berdasarkan tahapan proses kerja yang spesifik dan saling mendukung.

4. Sikap Pelaksana

Salah satu elemen penting yang berperan dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik adalah perilaku atau respons dari para pelaksana kebijakan itu sendiri. Hal ini sejalan dengan pandangan dalam teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, sikap pelaksana tidak hanya merefleksikan tingkat penerimaan terhadap kebijakan, tetapi juga menunjukkan sejauh mana mereka memahami dan memiliki komitmen untuk menjalankan kebijakan tersebut secara efektif.

Temuan penulis menunjukkan bahwa pihak pelaksana pada lembaga kearsipan provinsi memiliki pandangan yang cukup konstruktif dan menerima dengan baik kebijakan terkait alih media arsip. Para pelaksana tidak hanya memahami tujuan dari kebijakan tersebut, yakni untuk menjaga dan melestarikan arsip melalui proses digitalisasi, tetapi juga menunjukkan tingkat kepedulian dan tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan tugas-tugas mereka.

Sikap positif ini dapat ditafsirkan sebagai bentuk komitmen profesional dan moral, yang menjadi fondasi penting dalam mendukung keberlanjutan implementasi kebijakan. Ketika pelaksana memiliki motivasi intrinsik yang kuat, seperti kesadaran akan pentingnya arsip sebagai memori kolektif bangsa atau upaya untuk memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat, maka pelaksanaan kebijakan tidak hanya menjadi kegiatan administratif rutin, tetapi juga sebuah misi yang bermakna.

5. Komunikasi Antar Lembaga

Komunikasi menurut teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, adalah salah satu faktor penting yang memengaruhi seberapa baik pelaksanaan kebijakan publik berjalan. Adanya komunikasi yang baik memungkinkan perumus kebijakan dan pelaksana di lapangan memahami tujuan, prosedur, dan mekanisme pelaksanaan program.

Komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan alih media arsip di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan pola yang cukup efektif, meskipun terdapat dualitas dalam struktur kewenangan. Secara administratif, kebijakan ini berada di bawah koordinasi Biro Organisasi sebagai leading sector. Namun, dalam praktik teknisnya, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan justru menjadi aktor dominan yang mengelola kegiatan alih media arsip. Fakta ini mencerminkan adanya pembagian peran antara pengarah kebijakan dan pelaksana teknis, yang membutuhkan komunikasi lintas lembaga yang intensif dan konsisten.

Koordinasi yang dilakukan tidak hanya terbatas pada antar perangkat daerah di tingkat provinsi, tetapi juga menjangkau komunikasi vertikal dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai pembina kearsipan secara nasional. Kehadiran platform digital seperti Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) memperkuat transparansi dan efektivitas koordinasi melalui pelaporan langsung terhadap hasil alih media arsip.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Menurut Van Meter dan Van Horn, faktor eksternal yang meliputi aspek sosial, ekonomi, dan politik memiliki peran penting dalam memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian pada instansi kearsipan tingkat provinsi di Sumatera Barat, diketahui bahwa dari aspek sosial, rendahnya literasi arsip digital di masyarakat menghambat optimalisasi pemanfaatan layanan alih media arsip, meskipun infrastruktur telah tersedia. Dari sisi ekonomi, keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama, namun tetap dapat diatasi melalui komitmen tinggi pelaksana kebijakan. Sementara itu, secara politik, dukungan dari aktor politik seperti Gubernur menciptakan iklim positif tanpa adanya intervensi negatif. Secara keseluruhan, lingkungan eksternal dapat dikatakan cukup kondusif, karena meskipun terdapat hambatan sosial dan ekonomi, hal tersebut mampu diimbangi oleh dukungan politik, loyalitas pelaksana, dan pengawasan dari lembaga pusat (ANRI), sehingga mendukung keberhasilan implementasi kebijakan alih media arsip.

B. Hambatan Yang Dihadapi Petugas Kearsipan Atau Arsiparis Dalam Pelaksanaa Alih Media Arsip Di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat (Teori Hendrawati 2014)

1. Anggaran

Anggaran menjadi elemen krusial dalam mendukung keberlangsungan program alih media arsip. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan alokasi dana menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kegiatan digitalisasi arsip. Pengurangan dana dari pemerintah pusat berdampak pada minimnya jumlah arsip yang dapat dialihmediakan,

rendahnya kualitas perangkat, serta keterbatasan dalam pelatihan teknis pegawai. Hal ini menghambat pemenuhan standar nasional kearsipan dan memperlambat pencapaian target program. Kondisi ini sejalan dengan pandangan (Hendrawati, 2014) bahwa ketidakcukupan anggaran dapat membatasi kemampuan teknis dan operasional suatu kebijakan publik.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah personel yang terbatas menyebabkan beban kerja berlebih pada petugas yang terlibat dalam proses alih media. Selain itu, kurangnya pelatihan teknis berkelanjutan membuat kompetensi pegawai tidak berkembang optimal. Hal ini berdampak pada kualitas hasil digitalisasi dan efisiensi kerja. Hendrawati (2014) menekankan bahwa ketidaksesuaian kapasitas SDM menjadi penghambat serius dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan rutin, rekrutmen tenaga ahli, dan penataan tugas menjadi solusi penting yang perlu dilakukan.

3. Ketersediaan Infrastruktur

Kondisi perangkat keras seperti *scanner* dan komputer di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat belum memenuhi kebutuhan, baik dari segi jumlah maupun spesifikasi teknis. Kekurangan ini berdampak langsung terhadap kelancaran pelaksanaan proses digitalisasi, terutama pada arsip yang memerlukan penanganan khusus seperti arsip yang telah mengalami kerusakan fisik atau arsip berukuran besar yang tidak dapat diproses dengan peralatan standar. Sejalan dengan teori hambatan kebijakan menurut Hendrawati (2014), infrastruktur yang tidak memadai dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif, antara lain menurunnya produktivitas kerja, terhambatnya pelaksanaan program, serta penurunan kualitas hasil kebijakan. Dalam konteks digitalisasi arsip, hal ini mencakup terhambatnya proses konversi arsip fisik ke bentuk digital secara efisien dan berkualitas.

4. Kebijakan Perlu Adanya SOP

Keberadaan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat sudah merupakan langkah positif dalam mewujudkan pelaksanaan alih media arsip yang terstruktur. Namun, SOP tersebut belum diimplementasikan secara optimal di lapangan. Beberapa pelaksana teknis belum sepenuhnya mematuhi prosedur yang ada, sehingga menyebabkan ketidakkonsistenan dalam proses kerja. SOP yang masih bersifat umum, tanpa penjabaran teknis yang detail, menjadi salah satu hambatan utama. Ketidakjelasan ini berdampak pada variasi cara kerja antarpegawai, terutama saat menghadapi arsip yang rusak atau memerlukan perlakuan khusus, sehingga berisiko menurunkan kualitas hasil digitalisasi.

Permasalahan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan tertulis dan implementasi aktual, sebagaimana dijelaskan oleh Hendrawati (2014) bahwa hambatan implementasi kebijakan sering kali terletak pada isi kebijakan yang belum jelas dan kurang operasional. Kurangnya petunjuk teknis dalam SOP menyulitkan pelaksana, terlebih jika

tidak dibarengi dengan pelatihan atau pengalaman yang cukup. Oleh karena itu, revisi terhadap SOP menjadi kebutuhan mendesak. SOP perlu diperjelas dengan tahapan teknis yang rinci, khususnya dalam penanganan arsip yang bermasalah secara fisik. Selain itu, perlu dilakukan penguatan implementasi melalui pelatihan berkala bagi SDM serta pengawasan internal yang efektif. Upaya ini bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi, tetapi juga untuk menjamin mutu dan keberlanjutan pengelolaan arsip digital.

Simpulan

Implementasi alih media arsip di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat telah berkontribusi positif terhadap pelestarian dan aksesibilitas arsip di era digital. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, serta belum optimalnya standar operasional prosedur (SOP) teknis. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan alih media sudah mengarah dengan tepat, keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan di lapangan. Untuk itu, dibutuhkan pendekatan terpadu melalui peningkatan kapasitas SDM, penyediaan infrastruktur digital yang memadai, serta penyusunan dan penerapan SOP teknis yang lebih rinci. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi pemanfaatan arsip digital oleh pengguna eksternal serta mengkaji inovasi teknologi terbaru dalam pengelolaan arsip digital.

Daftar Pustaka

- Andhika. & Irawati. (2023). Strategi pemeliharaan arsip dinamis inaktif melalui alih media. *Jurnal Ilmiah Universitas Semarang*, 4(1).
- Aprison. & Syamsir. (2021). Manajemen kearsipan dalam penyelenggaraan administrasi negara di Kantor Kejaksaan Negeri Padang. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*, 3(1).
- Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). (2021). *Peraturan Nomor 2 Tahun 2021 tentang alih media arsip statis dengan metode konversi*. Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Arwana, et al. (2024). Alih media arsip sebagai upaya preservasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Labuhanbatu Utara. *Jurnal Pendidikan, Bahasa dan Budaya*, 3(2).
- Claudia, S., S., et al. (2023). Manajemen kearsipan pada Perusahaan X. *Jurnal Transekonomika*, 3(2).
- Finnahar, A. M. W. (2022). Analisis prosedur pelaksanaan alih media arsip di Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Padang. *Jurnal* (1) (2).
- Fitri, S. (2015). Alih media arsip dinamis inaktif ke CD-ROM di Kasubag Hukum Pengadilan Tinggi Padang. *Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Universitas Negeri Padang*, 4(1).
- Gunarto, I. (2024). *Refleksi akhir tahun Arsip Nasional Republik Indonesia 2024 menuju 2025*. Arsip

Nasional Republik Indonesia.

- Hardani. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Hartawan, R. C., & Kosasih, F. (2023). Implementation of the Van Meter and Van Horn zoning system policies model. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences*, 2(4), 1348–1358. <https://doi.org/10.55227/ijhess.v2i4.373>
- Hau, et al. (2020). Kesiapan sekolah dalam penerapan kearsipan berbasis digital. *Jambura Journal of Educational Management*, 1(1).
- Hendrawati, T. (2014). *Pedoman pembuatan e-book dan standar alih media*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Hermawati, et al. (2021). Digitalisasi arsip di Kantor Kelurahan Pamulang Timur. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 27(3).
- Huriyah, L. (2023). *Manajemen arsip di lembaga pendidikan*. Surabaya: Inoffast Publishing.
- Husnita, T. J., & Kesuma, M. (2020). Pengelolaan arsip sebagai sumber informasi bagi suatu organisasi melalui arsip manual dan arsip digital. *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam*, 1(2).
- Khaeruddin, et al. (2023). Pelestarian Arsip di Era Teknologi Digital. *Historical Studies Journal*. 2(2).
- Pasaribu, B., et al. (2022). *Metodologi penelitian*. Banten: Media Edu Pustaka.
- Rifauddin, M. (2016). Pengelolaan Arsip Elektronik Berbasis Teknologi. *Khazanah Al Hikmah Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan*. Vol. 4, No. 2.
- Rumengan, et al. (2021). Sistem informasi manajemen kearsipan berbasis web. *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 1(6).
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi penelitian*. Banguntapan, Bantul–Jogjakarta; Balen, Bojonegoro, Jawa Timur: Penerbit KBM Indonesia.
- Siregar, Y. B. (2019). Digitalisasi arsip untuk efisiensi penyimpanan dan aksesibilitas. *Jurnal Administrasi dan Kesekretarian*, 4(1).
- Tenawahang, & Ines. (2023). Systematic literature review: Rancang bangun sistem informasi manajemen arsip digital di Indonesia. *Journal of Research and Publication Innovation*, 1(2).
- Tiara, F. M., & Husna, J. (2018). Analisis alih media arsip aktif personal file untuk temu kembali arsip di PT Sucofindo Cabang Semarang. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 7(4).
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan*. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Waruwu, et al. (2024). Analisis manajemen kearsipan dalam upaya meningkatkan pengelolaan penatausahaan administrasi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Gunungsitoli. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)*, 4(2).
- Yusuf, & Zulaikha. (2019). Perkembangan pengelolaan arsip di era teknologi. *Jurnal Ilmiah Perpustakaan dan Informasi*, 6(2).